

## Post-Covid-19 Pandemic Economic Recovery: Optimizing the SDG's Program Through Local UMKM

Fahmi Ihsan Margolang<sup>1\*</sup>, Lia Nurhasanah<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

**Corresponding Author:** Lia Nurhasanah [lianurhasanah34@gmail.com](mailto:lianurhasanah34@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Economy, Covid-19, SGD's Program, UMKM

*Received :* 20 March

*Revised :* 20 April

*Accepted:* 10 May

©2023 Margolang, Nurhasanah:  
This is an open-access article  
distributed under the terms of the  
[Creative Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has become quite a serious problem, leaving all countries in the world in ruins, almost all development sectors are in disarray, especially in the economic sector. This research aims to combine and optimize the SDG's Program with Local MSMEs as an effort to recover the post-Covid pandemic economy -19. This research method uses a literature study, by analyzing the SDG's programs which have a correlation with the economy, which is then linked to empowering local MSMEs. The results of this research show that the Sustainable Development Goals are still not optimal due to not being on target between planning and budget use, this is what causes slow economic growth, especially in MSMEs, therefore it is necessary to increase awareness to optimize the SDG's Program in an effort to increase and empower Local MSMEs as an effort Indonesia's economic recovery.

## Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19: Optimalisasi Program SDG's Melalui UMKM Lokal

Fahmi Ihsan Margolang<sup>1\*</sup>, Lia Nurhasanah<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

**Corresponding Author:** Lia Nurhasanah [lianurhasanah34@gmail.com](mailto:lianurhasanah34@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Ekonomi, Covid-19, Program SDG's, UMKM

*Received :* 20 Maret

*Revised :* 20 April

*Accepted:* 10 Mei

©2023 Margolang, Nurhasanah:  
This is an open-access article  
distributed under the terms of the  
[Creative Commons Atribusi 4.0  
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

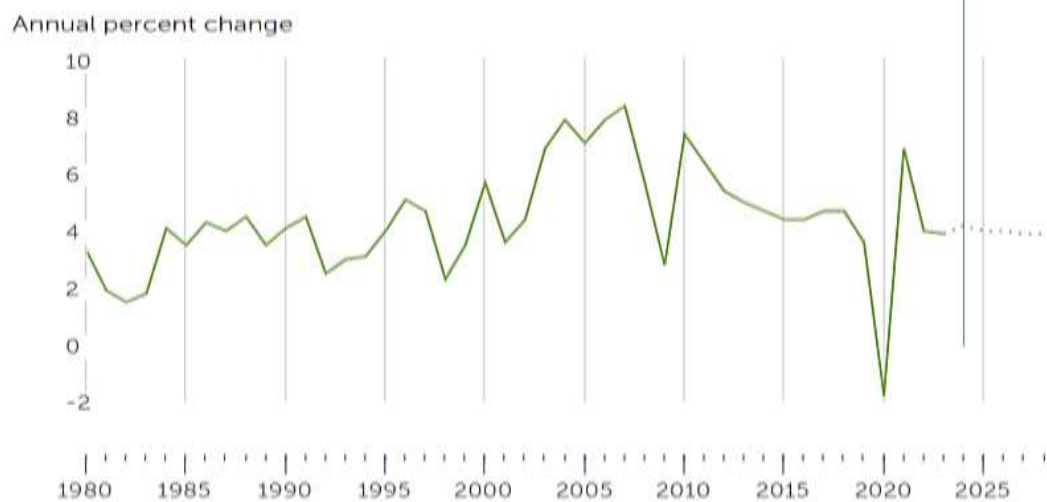
Pandemi Covid-19 menjadi problematika yang cukup serius, membuat seluruh Negara yang ada didunia porak-poranda, hampir segala sektor pembangunan kelimpungan, terkhusus pada sektor ekonomi, penelitian ini bertujuan untuk mengkombinasikan serta Mengoptimalisasi Program SDG's dengan UMKM Lokal sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dengan cara menganalisis keprogram SDG's yang memiliki korelasi dengan perekonomian, yang kemudian dihubungkan dengan pemberdayaan UMKM Lokal. Hasil penelitan ini menunjukkan Sustainable Development Goals masih belum optimal diakibatkan belum tepat sasaran antara perencanaan dengan penggunaan anggaran, hal inilah yang menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi terkhuus pada UMKM, oleh sebab itu perlu meningkatkan kesadaran untuk mengoptimalkan Program SDG's dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan UMKM Lokal sebagai upaya pemulihan ekonomi Indonesia.

## PENDAHULUAN

Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 disebabkan oleh Virus SARS-CoV-2.(WHO, 2020) yang bermula Epidemi di Tiongkok Pada Akhir Desember 2019, dan kemudian diumumkan Covid 19 menjadi Pandemi diseluruh dunia pada 12 Maret 2020.(Mathoulin et al., 2020), kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres No 12/2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional dan melalui Keppres 7/2020 ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.(Adrian et al., 2022) Penyebaran virus Corona berdampak pada sektor investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga karena para wisatawan yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli oleh-oleh. Jika wisatawan yang berkunjung berkurang, maka omset UMKM juga akan menurun.(Sumarni, 2020)

Sebuah Penelitian Pada International Journal of Energy Economics and police yang ditulis oleh Miar, Sunaryo, dan Jeky Melkianus Sui menerangkan bahwa Pandemi Covid 19 mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi, bahkan dengan menyebarnya Covid 19, mengalami gangguan sinkron terhadap penawaran dan permintaan dalam ekonomi dunia yang saling berhubungan, disisi lain berkurang efesiensi SDM akibat terbatasnya aktivitas diakibat pandemi Covid 19.(Neneng & Sui, 2022)

Berdasarkan data dari IMF, pada tahun 2020 pertumbuhan GDP Indonesia menurun sebanyak 4,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Jika dilihat lebih rinci pertumbuhan GDP Indonesia pernah turun drastis pada masa krisis tahun 1998, kemudian kembali stabil dan hingga tahun 2020 pertumbuhan GDP Indonesia hanya berada pada angka 0.5% saja.



**Gambar 1. Pertumbuhan GDP di Indonesia**

Sumber: International Monetary Fund(Fund, 2023)

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,15 persen poin. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60 ribu orang, berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99 persen pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat

pendidikan, TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih yang paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 8,49 persen.(Statistik, 2020) Pemutusan hubungan kerja, berdampak kepada pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan, masyarakat miskin meningkat.

Hal itu menjadi isu terkini dan oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana pemulihan ekonomi pasca pandemi di Indonesia. Pemerintah perlu mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga agar perekonomian di Indonesia bisa tetap stabil. Sehingga ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi. Terkait dengan solusi dari persoalan ini, pemerintah Indonesia pada era Joko Widodo melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals (Selanjutnya disingkat SDG's) dengan mengadopsi hasil kesepakatan SDG's melalui prinsip nawa cita. Nawa cita sendiri merupakan visi Joko Widodo yang merupakan refleksi dari pemikiran Trisakti Presiden Soekarno. Presiden Joko Widodo percaya bahwa konsep Nawa Cita mampu mengatasi berbagai problematika yang dihadapi masyarakat dan dapat menjadi haluan dalam panduan melewati jalan perubahan menuju kesejahteraan.(Kumolo, 2017, p. 40)

Secara umum, Usaha Mikro Kecil Menengah (Selanjutnya disingkat UMKM) merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).(Nayla, 2014, p. 12) Dalam perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Oleh karena itu, dengan menyadari betapa pentingnya UMKM (paling tidak secara potensial) seperti yang diuraikan di atas tersebut, tidak heran kenapa pemerintah-pemerintah di hampir semua NSB (termasuk Indonesia) sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program.(Tambunan, 2009, pp. 1-4) Salah satu program yang akan dibahas dalam makalah ini adalah SDG's.

Michael Bobby Hoelman, Senior Adviser INFID menyatakan bahwa SDG's penting karena inter-koneksi pembangunan memerlukan tindakan bersama untuk menanggulangi masalah global, yang juga menjadi masalah Indonesia, seperti; kemiskinan, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Agenda SDG's menjadi salah satu panduan atau referensi bagi kerjasama pembangunan global pasca MDG's. Lebih lanjut Michael menyatakan Indonesia memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan pembahasan SDG's dengan RPJMN. Pemerintah perlu memastikan ambisi rencana jangka menengahnya terutama terhadap target dan indikator SDG's.(Arianto, 2018, pp. 1-17)

Terdapat 3 studi terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian ini. Pertama, jurnal penelitian yang berjudul "Pengembangan Community Based Economic Development Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) 2030 (Studi Deskriptif Pada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di

Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)“ yang ditulis oleh Neny Susanti, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Hasil dari penelitian ini adalah: Dalam hal Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat (CBED), pengembangan UPPKS di Kabupaten Jombang dilakukan melalui 3 strategi, yaitu peningkatan wawasan dan pengetahuan, penentuan gaya kepemimpinan, dan pemberian pendampingan kelompok UPPKS. Masih terdapat berbagai kendala dalam pengembangan kelompok UPPKS seperti pengelolaan administrasi yang belum terkelola dengan baik, kurangnya pembinaan, anggota kelompok yang tidak membayar cicilan modal, kurangnya bantuan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG), kurangnya wawasan pemasaran, kurangnya komitmen dan kesadaran kelompok. Lebih jauh lagi, kontribusi kelompok UPPKS berbasis CBED sebagai upaya pencapaian SDG’s untuk tujuan pertama “tanpa kemiskinan” di Kabupaten Jombang selama ini telah memberikan dampak ekonomi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, dampak sosial lingkungan sekitar dan lingkungan hidup. Pencapaian dilakukan dengan partisipasi masyarakat dalam inovasi untuk memanfaatkan potensi yang ada, peran pemerintah dalam kebijakan selanjutnya, dan dukungan modal atau infrastruktur untuk mendukung pengembangan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Studi terdahulu kedua, jurnal penelitian berjudul “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis *“Community Based Economic Development”* (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo) yang ditulis oleh Moch. Rochjadi Hafiluddin, Suryadi, dan Choirul Saleh. Hasil penelitian ini adalah diperlukan strategi pemberdayaan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tepat adalah dengan pendekatan strategi pemberdayaan UMKM berbasis komunitas serta dipikirkan segala aspek penunjangnya.

Studi terdahulu ketiga, ditulis oleh Abdullah Abidin dalam jurnal yang berjudul “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah” memberikan kesimpulan bahwa dalam pengembangan UMKM sebagai kekuatan strategi dalam mempercepat pembangunan daerah, *pertama*; potensi pengembangan UMKM di daerah sangat besar. *Kedua*; pengembangan UMKM harus dilakukan sesuai budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah. *Ketiga*; sektor UMKM sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. *Keempat*; peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan UMKM. *Kelima*; SDA dan SDM serta pasar dunia yang semakin terbuka pada era global merupakan potensi besar jika adanya strategi replikasi yang meliputi kerjasama jaringan pemerintah, LSM, swasta dan individu maupun kelompok yang dikelola dalam bentuk kemitraan.

Dari beberapa uraian diatas, dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengidentifikasi optimalisasi SDG's yang dilihat melalui UMKM lokal, dimana SDG's ini begitu krusial dalam pembangunan ekonomi, UMKM juga sangat berperan penting dan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian SDGs tahun 2030 tujuan pertama yakni "Tanpa Kemiskinan". Sehingga, pada makalah ini, fokus kajiannya adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan melihat optimalisasi SDG's melalui UMKM lokal. Timbul pertanyaan, bagaimana optimalisasi SDG's melalui UMKM lokal? Untuk mencapai pemulihan ekonomi pasca pandemic tentunya perlu mengetahui bagaimana optimalisasi dari suatu program yang telah diusahakan. Sehingga ujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui optimalisasi SDG's melalui UMKM lokal dalam memulihkan perekonomian pasca pandemi, konfigurasi UMKM lokal dan SDG's sangat tepat untuk diimplementasi dalam fondasi pemulihan ekonomi pasca pandemi di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### *Manajamen SDM (Sumber Daya Manusia)*

Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan fisik dan pikiran yang dimiliki setiap individu,(Ardista et al., 2022) SDM memiliki peran penting dalam menjalankan struktur Organisasi dalam mencapai tujuannya, adapun cakupan kualitas dari SDM adalah keahlian dan keterampilan kerja.(Sulaksono, 2018) Ada 3 hal menurut matutina kategori SDM yang berkualitas : 1.(Knowledge) Pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap suatu ilmu yang diperoleh dari proses pembelajaran, 2.(Skill) Keterampilan dalam menguasai suatu hal dengan baik, dan 3.(Abilities) Kemampuan untuk berwirausaha.

Sumber Daya Manusia yang baik,dan sesuper apapun, pada dasarnya tidak dapat berjalan sempurna dengan sendirinya, maka perlu mengkolaborasikan dari berbagai macam keahlian SDM yang ada, dengan tujuan dapat saling melengkapi satu dengan yang lain, oleh karena itulah Manajemen SDM begitu penting untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas yang ia miliki, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Atmaja dan Ratmawati tentang seberapa penting manajemen SDM dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah, ternyata dari hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa peningkatan dan manajemen SDM yang baik memiliki impact yang cukup luar biasa untuk memajukan UMKM Indonesia, dengan alasan ketika membangun usaha tentu harus memiliki kemampuan dari mulai Marketing, Negosiasi hingga faham cara yang baik dalam mengelola keuangan.(Atmaja & Ratnawati, 2018)

Manajemen SDM sendiri sejalan dengan tujuan SDG's yakni Kesejahteraan yang baik dan pendidikan yang berkualitas, jika SDM dapat dimanajamen dengan baik dan memiliki keterampilan yang memadai, maka dapat memaksimalkan kegiatan perekonomian dan mendorong majunya UMKM lokal, sehingga dapat menjadi solusui pemulihan serta menstabilkan perekonomian pasca Pandemi Covid 19.

### *Support Pertumbuhan UMKM*

Dalam menjalankan usaha, tentu pentingnya dukungan dari berbagai pihak terkhusus pemerintah dalam percepatan penumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, sebagaimana yang dikatakan Pak Jokowi, yang ditulis dalam jurnal Ekonomi oleh Lili Marlinah, beliau menerangkan bahwa jumlah UMKM ditanah ini sangat besar jumlahnya, namun tidak sedikit yang kemudian mengalami kesulitan dan tantangan dalam mengembangkan usahanya, dan masalah yang kerap terjadi adalah sulitnya mendapat modal usaha baik dari pihak Bank maupun Pemerintah.(Marlinah, 2020) oleh sebab itulah perlu mengoptimalkan dukungan kepada UMKM untuk memperlancar aktivitas penumbuh kembangan UMKM di Indonesia.

Sepanjang Pandemi melanda Indonesia, Kemenuk berinisiatif untuk membangun perekonomian, terkhusus pada UMKM memberikan bantuan modal usaha kepada para pelaku usaha, dengan pembagian 4 jenis,yaitu : 1.KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan modal usaha UMKM dalam bentuk pinjaman, 2.LPDP KUKM adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM, 3.Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) Program ini bertujuan untuk menurunkan bunga selama pandemi dan yang terkahir 4. Program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro, ini adalah program pemerinrah untuk memberikan modal usaha kepada para pelaku usaja.(Kemenkopukm, 2023)

Dengan adanya Support Pertumbuhan UMKM dipandang dapat menjadi solusi memajukan UMKM dan tentunya ini sejalan dengan tujuan SDG's yaitu "*mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua*". Oleh karena itulah dengan memaksimal tujuan SGD's dengan mendorong pertumbuhan UMKM dapat menjadi solusui terhadap pembangunan Ekonomi berkelanjutan.

### *Pembangunan Infrastruktur*

Pembangunan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia agar mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Apabila pembangunan dikelola dengan baik secara tepat tentunya akan memberikan dampak yang positif. Pembangunan infrastruktur bertujuan sebagai layanan dan fasilitas untuk masyarakat luas, pembangunan ini diperlukan agar perekonomian berfungsi dengan baik. Pembangunan infrastruktur di Indonesia berperan sangat krusial pentingnya terutama bagi daerah-daerah yang masih belum maju. Sedangkan, infrastruktur dapat diartikan segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb); sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya.(Nasional, 2008, p. 554) Untuk mencapai pemulihan ekonomi, tentunya perlu ada korelasi antara infrastruktur yang ada dengan tenaga kerja yang dapat diandalkan dan terampil dibidangnya, akan menjadi suatu kualitas sendiri yang mempunyai hasil pekerjaan yang bermutu, stabilitas ekonomi, keadilan, distributif dan kepedulian terhadap alam.(Almizan, 2016, p. 219) Salah satu perwujudan dari usaha untuk menciptakan tenaga kerja yang

terampil adalah dengan adanya UMKM lokal. Hal tersebut sesuai dengan tujuan ke-9 dari program SDG's untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Secara strategis peranan penyediaan infrastruktur bagi UMKM adalah sebagai berikut:(Astuti, 2019, pp. 71-86) 1) mempercepat dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan biaya yang lebih murah sehingga berdampak terhadap harga barang dan jasa yang murah dengan kualitas yang baik oleh UMKM. 2) infrastruktur yang baik dapat memperlancar transportasi yang pada gilirannya merangsang adanya stabilisasi dan mengurangi disparitas harga antar daerah (penyamaan harga). Dengan adanya kemudahan transportasi, maka barang-barang dapat dialirkan atau didistribusi ketempat-tempat yang kekurangan (defisit) akan suatu barang sehingga akan tercapai kestabilan harga-harga. 3) infrastruktur yang memperlancar transportasi berfungsi meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, karena banyaknya daerah yang letaknya jauh dari pasar, sehingga berdampak terhadap ongkos angkut yang mahal bagi pelaku UMKM. Dengan tersedianya transportasi yang baik dan murah memungkinkan hasil produksi daerah tersebut dapat diangkut dan dijual kepasar atau dengan kata lain pelaku UMKM dapat menjangkau konsumen. 4) infrastruktur yang memperlancar transportasi turut memengaruhi terbentuknya harga yang efisien. Transportasi yang baik dan murah akan menurunkan biaya transaksi. 5) infrastruktur yang memperlancar transportasi dapat menimbulkan spesialisasi antar daerah. Transportasi murah dan mudah akan mendorong pembagian kerja dan spesialisasi secara geografis antar daerah. Infrastruktur merupakan instrumen untuk memperlancar berputarnya roda perekonomian sehingga bisa mempercepat akselerasi pembangunan. Semakin tersedianya infrastruktur akan merangsang pembangunan di suatu daerah. Sebaliknya, pembangunan yang berjalan cepat akan menuntut tersedianya infrastruktur agar pembangunan tidak tersendat. Dengan demikian, infrastruktur berguna untuk memudahkan mobilitas faktor produksi, terutama penduduk, memperlancar mobilitas barang dan jasa, juga memperlancar perdagangan antar daerah. Ini berarti pengembangan infrastruktur akan berdampak secara multiflayer effect terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

#### *Revitalisasi Kemitraan*

Istilah revitalisasi dianggap sebagai hal yang baru, istilah tersebut sering digunakan dalam sejumlah konteks yang berbeda. Misalnya, revitalisasi lebih kepada konteks perkembangan ekonomi dan ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara.(A, 2014, p. 2) Sedangkan definisi kemitraan dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan atau "partnership" mengandung pengertian adanya hubungan kerjasama antara dua atau lebih pihak yang bersinergis dan bersifat sukarela atas dasar saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang dirugikan, masing-masing pihak yang bermitra akan mendapat manfaat dari kerjasama tersebut. Kemitraan usaha adalah hubungan antar pelaku usaha yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan

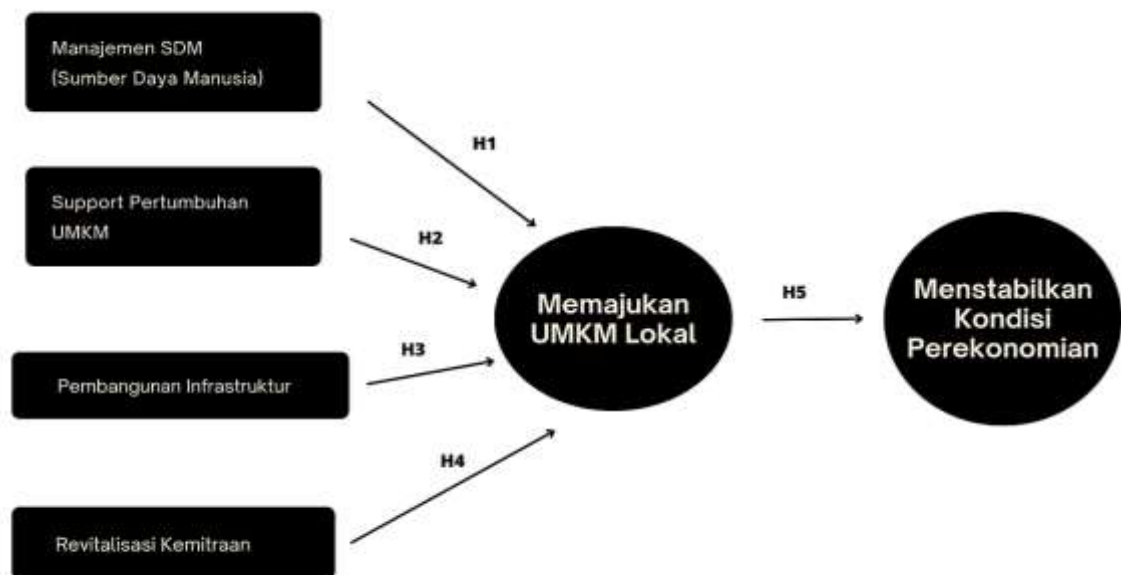
dalam hubungan kerja yang sinergis. Dengan kata lain, kemitraan usaha merupakan hubungan kerjasama pelaku usaha yang sejajar, terutama dalam pengambilan keputusan, dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. (Asiati & Nawawi, 2016, pp. 103-118) Komitmen dan kesungguhan kedua belah pihak mewujudkan prinsip kemitraan yakni saling melengkapi, memperkuat, membesarkan dan menguntungkan.

Pemerintah Indonesia saat ini juga sudah mengeluarkan beberapa undang-undang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibilities* (Selanjutnya disingkat CSR). CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stake-holders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut. (Widjaja & Yeremia, 2008) UU yang berkaitan dengan CSR seperti UU no 40 tahun 2007 tentang perusahaan perseroan terbatas yang mencantumkan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perseroan, UU no 47 tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan perseroan terbatas, UU no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjalankan tanggung jawab lingkungan dan sosial, dan UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada saat ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun permasalahan UMKM muncul diantaranya yaitu masalah permodalan, terbatasnya SDM, sarana dan prasarana serta terbatasnya produk sehingga UMKM masih kalah bersaing dengan usaha besar yang dapat menguasai pasar dalam jumlah hasil produksi yang besar pula. Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama dengan usaha besar. Hal ini sesuai dengan tujuan ke-17 program SGD's yaitu menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Bank Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu pengembangan UMKM. Bank Indonesia hadir untuk mengatasi atau mengurangi permasalahan tersebut dengan Program Sosial Bank Indonesia. Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) mempunyai program-program strategis pengembangan bidang ekonomi dan peningkatan pengetahuan serta pemahaman masyarakat, disamping melakukan program kepedulian sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

PSBI sendiri secara umum terbagi menjadi tiga yaitu, yang pertama pengembangan kapasitas ekonomi yang membantu para UMKM atau kelompok-kelompok yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, kemudian pengembangan sumber daya manusia seperti pemberian beasiswa Generasi Baru Indonesia (Gen BI) dan yang terakhir pengembangan kepedulian seperti pemberian bantuan untuk rumah ibadah, bantuan bencana alam seperti banjir, kebakaran kemudian pengadaan rumah pintar, sanggar tari serta perpustakaan

BI Corner. Namun program ini juga difokuskan ke pengembangan kapasitas ekonomi dengan besarnya persentasi sebanyak 60% dana yang dipakai untuk pengembangan kapasitas ekonomi. Tujuannya untuk membantu meningkatkan ekonomi serta pendapatan para UMKM sesuai dengan tujuan dari Bank Indonesia mengatasi dan mengendalikan inflasi. Pemberian bantuan PSBI terhadap UMKM yang berbentuk kelompok dan bukan UMKM yang berbentuk perorangan sesuai dengan tujuan Bank Indonesia yaitu mengendalikan inflasi, sebagai contohnya harga ayam yang tinggi, FKPKK meneliti ke para UMKM untuk mengetahui penyebab kenaikan harga ayam dan kendala apa yang terjadi dilapangan sehingga menyebabkan kenaikan harga ayam, kemudian setelah mengetahui penyebabnya pihak Bank Indonesia memberikan bantuan berupa kandang peternak untuk memudahkan para UMKM ini agar bisa mengatasi permasalahan tersebut. (Khairunnisa, 2018) Berdasarkan hal tersebut, UMKM akan terbantu jika tujuan ke-17 dari program SDG's ini dijalankan. Maka Kerangka Pikiran dapat dikembangkan seperti berikut :



**Gambar 2: Kerangka Pikiran**

Dari Program SDG's yang kemudian ditarik menjadi beberapa point yang kiranya dapat menjadi solusi terhadap permasalahan ekonomi, terkhusus pada penumbuh kembangan UMKM, oleh karena itu hipotesisnya sebagai berikut:

H1 = Dengan manajemen SDM yang baik dapat memaksimalkan pertumbuhan UMKM lokal.

H2 = Support pertumbuhan UMKM adalah cara yang efisien dalam memajukan UMKM lokal.

H3 = Pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan UMKM Lokal

H4 = Revitalisasi kemitraan sebagai penyokong dan penguat dalam memajukan UMKM lokal.

H5 = Dengan majunya UMKM lokal dapat menjadi solusi dalam menstabilkan kondisi perekonomian.

## **METODOLOGI**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Basrowi & Suwandi, 2008, p. 21), sedangkan tujuan dari penelitian kualitatif menurut Sulisty Basuki ialah bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. (Basuki, 2010, p. 78) Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. (Hasan, 2002, p. 58) Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Menurut Martono, studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Peneliti juga menggunakan studi pustaka dalam teknik pengumpulan data. (Martono, 2011, p. 97) Studi pustaka dalam teknik pengumpulan data ini merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku-buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk mencari fakta dan mengetahui konsep metode yang digunakan.

Hal yang pertama dilakukan adalah dengan menyajikan program SDG's yang telah dirancang oleh forum internasional, yang berkaitan dengan ekonomi, dan kemudian dikorelasikan dengan penumbuh kembangan UMKM lokal, setelah mendapatkan point-point yang dapat menjadi solusi dalam memajukan UMKM, akan dianalisis, seberapa efisien program SDG's tersebut untuk pertumbuhan UMKM, setelah mendapatkan hasil penelitian, maka terakhir akan dihubungkan dengan peran UMKM dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi.

## **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan laporan *Global Sustainable Development Report 2019*, target 2030 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* masih belum optimal akibat belum tepat sasaran antara perencanaan dengan penggunaan anggaran. (Hakim et al., 2022, p. v)

**Tabel 1: Hasil Analisis Indeks 5 SDG's yang berhubungan dengan ekonomi di Indonesia**

<p style="text-align: center;"><b>Laporan Global Sustainable Development Report 2019 mengenai Indeks dan Dasbor SDG di Indonesia</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SDG's yang berhubungan dengan ekonomi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Keterangan</b></p>
	<p>1. Tanpa kemiskinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tantangan signifikan tetap ada.</li> <li>- Status: mengikuti proses yang seharusnya (normal).</li> </ul>
	<p>8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tantangan signifikan tetap ada.</li> <li>- Status: mengikuti proses yang seharusnya (normal).</li> </ul>
	<p>9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tantangan utama tetap ada.</li> <li>- Status: sedang meningkat.</li> </ul>
	<p>10. Mengurangi ketimpangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tantangan utama tetap ada.</li> <li>Status: data tidak ada.</li> </ul>
	<p>17. Kemitraan untuk mencapai tujuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tantangan utama tetap ada.</li> <li>- Status: tersendat</li> </ul>

Sumber: (Analysis, 2019, p. 24)

### SDG1 – End Poverty

	Value	Rating	Trend
Poverty headcount ratio at \$1.90/day (% population)	4.4	●	↑
Poverty headcount ratio at \$3.20/day (% population)	23.7	●	↑

### SDG8 – Decent Work and Economic Growth

Adjusted Growth (%)	-0.1	●	●●
Prevalence of Modern Slavery (victims per 1,000 population)	4.7	●	●●
Adults (15 years +) with an account at a bank or other financial institution or with a mobile-money-service provider (%)	48.9	●	↑
Unemployment rate (% total labor force)	4.3	●	↑
Fatal work-related accidents embodied in imports (deaths per 100,000)	0.1	●	●●

### SDG17 – Partnerships for the Goals

Government Health and Education spending (% GDP)	4.9	●	↗
High-income and all OECD DAC countries: International concessional public finance, including official development assistance (% GNI)	NA	●	●●
Other countries: Government Revenue excluding Grants (% GDP)	12.5	●	↓
Tax Haven Score (best 0-5 worst)	*	0	● ●●



**Gambar 3. Hasil Analisis Indeks 5 SDG's yang Berhubungan Dengan Ekonomi di Indonesia**

Sumber: (Analysis, 2019, p. 235)

### PEMBAHASAN

SDG's (*Sustainable Development Goals*) adalah resolusi yang diluncurkan oleh PBB pada ulang tahun Ke- 70 di New York Pada Tanggal 25-27 September 2023, meluncurkan *new global Sustainable Development Goals*, yang bertujuan menguatkan 3 unsur pokok yakni, ekonomi, sosial dan lingkungan.(Baeyens & Goffin, 2015) *Department of Economic and Social Affairs* menerangkan ada 17 Tujuan dari Program SDG's, yaitu:(*The Goals SDG's*, 2023)



**Gambar 4. Sustainable Development Goals**

Sumber: Gavi Vaccine Alliance(*Sustainable Development Goals Learn about Immunisation's Key Role in Achieving 14 of the 17 Sustainable Development Goa*, 2020)

Dari ke-17 Tujuan Program SDG's ada beberapa hal yang berkaitan dengan upaya pertumbuhan perekonomian, pada tujuan SDG's ke-1, yakni "mengakhiri segala bentuk kemiskinan", memiliki hubungan dengan perekonomian, karena kemiskinan adalah bentuk ketimpangan ekonomi, selanjutnya ada pada tujuan SDG's ke-8, "Mendukung pertumbuhan ekonomi

yang *continue*, inklusif dan berkelanjutan, berkesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak”, dan program ini tentu memiliki korelasi dengan perekonomian, yang bertujuan menumbuhkan daya ekonomi yang berkelanjutan. Pada tujuan SDG’s ke-9, “Membangun infrastruktur yang tangguh, promosi industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong Inovasi” hal ini juga memiliki hubungan dengan ekonomi, yakni dengan pembangunan Infrastruktur, mengoptimalkan industri, dapat mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi. Kemudian tujuan SDG’s ke-10, “Mengurangi ketimpangan dan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif” terdapat korelasi dengan ekonomi. Ketika mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara dengan cara mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan politik, menghilangkan kebijakan dan praktik diskriminatif, mengadopsi kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial dan kebijakan migrasi yang memfasilitasi mobilitas orang dengan aman dan bertanggung jawab akan secara progresif mencapai dan memelihara pertumbuhan pendapatan, memberdayakan dan mendorong penyertaan sosial, ekonomi dan politik bagi semua, memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketimpangan pendapatan/*outcome*. Kemudian yang terakhir ada pada tujuan SDG’s ke-17, yakni “Memaksimalkan kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan” dan program ini juga memiliki hubungan dengan penumbuhan ekonomi, karena dengan kemitraan yang bagus, dapat memaksimalkan kelancaran arus ekonomi lokal maupun dunia.

Dari ke 17 Tujuan SDG’s terdapat 4 Program yang sejalan dengan pertumbuhan perekonomian, yang tentunya juga memiliki kaitan dengan UMKM, program ke-1 adalah tanpa kemiskinan, sebab kemiskinan adalah pengaruh buruknya keadaan ekonomi, disebabkan SDM yang tidak memiliki kapasitas yang memadai, sebagaimana sebuah penelitian yang berjudul “Kajian Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang” yang dilakukan oleh Mita Natalia dan Muhammad Mukti Alie, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, yakni rendahnya kualitas SDM serta buruknya pembangunan infrastruktur,(Natalia & Mukti, 2014) sebab SDM memiliki peran yang begitu penting dalam struktur tatanan perekonomian yang sehat, terutama dalam membangun UMKM, sebab dalam menjalankan dan mendorong tumbuhnya UMKM sangat dibutuhkan talenta yang tangguh.

Pada program ke-2 SDG’s adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, yakni dengan cara mensupport UMKM Lokal, seperti halnya yang disampaikan Menteri Penindustrian Muhammad Sholeh, untuk kembali menggalakkan program P3DN dengan cara menginstruksikan pada masyarakat maupun Badan Usaha, untuk menggunakan produk dalam negeri dan penindustrian dalam negeri dengan cara pengamanan pasar domestik.(Kementrian Penindustrian, 2015) Kemudian pada siaran Pers Kementrian Bidang Koordinator bidang Perekonomian meluncurkan Dukungan Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM untuk Memperkuat Stabilitas Ekonomi Daerah, sebab kata Haryo Limanseto sebagai kepala biro Layanan Informasi, dan Persidangan, menegaskan bahwa UMKM memiliki peran yang begitu penting terhadap

pertumbuhan PDB tercatat kontribuisnya sebesar 61% dan penyerapan Tenaga Kerja hingga 97%.(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022).

Pembangunan Infrastruktur juga merupakan program dari SDG's yang memiliki peran luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dijelaskan Ketut Rastuti pada Jurnal Manajemen, bahwa pembangunan Infrastruktur begitu penting dalam penyaluran sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat berdampak dengan harga yang dijual, apabila infrastrukturnya baik, maka biaya distribusi juga tidak terlalu mahal, dan tidak menjadi beban terhadap harga yang dipasarkan kemasyarakat, oleh karena itulah, pembangunan infrastruktur memiliki peran yang cukup *urgent* dalam pertumbuhan UMKM.

Berdasarkan hasil dari penelitian, program-program SDG's sudah bagus dan memiliki korelasi dengan UMKM lokal. Namun, dari segi efisiensinya, penelitian ini menemukan bahwa terkait SDG's yang selama ini sudah dilakukan, masih belum optimal akibat belum tepat sasaran antara perencanaan dengan penggunaan anggaran. Dalam laporan *Global Sustainable Development Report 2019*, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutterres menyatakan perkembangan SDG's di seluruh dunia memang belum optimal. Implementasi SDG's masih belum sesuai dengan target awal. Target tersebut hanya bisa terpenuhi dengan kerja sama lintas instansi, pemerintah, dan lintas *stakeholder*.(Analysis, 2019)

Dalam tujuan SDG's ke-1 untuk mencapai penuntasan tidak ada masyarakat dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan atau *no one left behind*, masih ada masalah di sektor pendidikan yang belum dituntaskan. Masalah turunan di sektor pendidikan, misalnya, belum terjaminnya semua negara memberi akses pendidikan.(Lawi, 2019, p. 1) Terkait dengan insentif, Shantanu menyebut masih ada beberapa insentif pembiayaan berupa subsidi yang diberikan belum tepat sasaran. Misalnya, untuk menjaga lingkungan namun insentif yang diberikan masih kepada energi yang belum terbarukan, atau energi fosil. Hal-hal yang masih kontra produktif tersebut memicu perkembangan implementasi SDG's menjadi lamban.(Lawi, 2019, p. 1) Dalam indeks SDG's ke-8 di Indonesia, di tengah perlambatan ekonomi global, rapor pertumbuhan ekonomi Indonesia justru tumbuh positif pada kuartal II/2022. Hal itu ditopang oleh peningkatan daya beli yang mendorong konsumsi rumah tangga. Namun, tantangan signifikan tetap ada. Menkeu Sri Mulyani menyebut ada 3 tantangan ekonomi yang harus diwaspadai pemerintah pada 2023 mendatang; kenaikan suku bunga, inflasi dan pelemahan ekspor.(Tim, 2022, p. 1) Di sisi lain, kinerja belanja pemerintah pada justru melemah.(Caesario, 2022, p. 1) Kemudian dalam SDG's ke-9 terkait dengan industri, inovasi dan infrastruktur, pemerintah di Indonesia saat ini tengah gencar mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia.(Sukwika, 2018, pp. 115-129) Peningkatan infrastruktur dianggap menjadi salah satu pilihan strategis dalam hal mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur yang baik dan merata dapat memberikan dampak berupa efisiensi, memperlancar barang dan jasa, mendorong produktivitas daerah, dan juga mengurangi ketimpangan antarwilayah.(Harahap, 2021, p. xvi)

Sayangnya, meskipun infrastruktur di Indonesia meningkat, dari segi kualitas belum begitu baik. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan bahwa kualitas infrastruktur di Indonesia sangat buruk akibat korupsi dan potongan-potongan saat dilakukan tender, penganggaran hingga pelaksanaan sebuah proyek. (Kamil, 2022, p. 1) Selain kualitasnya yang buruk, terjadi ketimpangan juga dalam infrastruktur. Tentu tujuan SGD's ke-10 belum tercapai. Mengingat, adanya kesenjangan ekonomi (PDRB per kapita) yang cukup tinggi antarprovinsi di Indonesia. Hal ini diperlihatkan oleh nilai Indeks Williamson PDRB per kapita yang berkisar pada angka 0.7. Tingginya kesenjangan tersebut seringkali diasosiasikan dengan kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antara provinsi. (Sukwika, 2018, pp. 115-129) Terakhir, terkait tujuan SGD's ke-17 sebetulnya memberikan kerangka kemitraan antar-sektor. Sayangnya tak cukup elaboratif dalam memandu bagaimana pemerintah-swasta-masyarakat sipil bisa melakukan kemitraan itu. Lagi-lagi, hal ini penting dipandang sebagai pekerjaan rumah bagi masing-masing sektor untuk memikirkan bagaimana bentuk kemitraannya, lalu mengusulkan kepada sektor-sektor yang lain dalam sebuah forum bersama. Kesepakatan kemitraan di dalam negara perlu memuat di antaranya bagaimana masing-masing target (yang telah dilihat kaitannya dengan Target-target lainnya di dalam beragam tujuan) diuraikan menjadi indikator, peran masing-masing pihak, bentuk kerjasama yang diperlukan termasuk kelembagaannya, serta sumber daya yang dibutuhkan dan tersedia untuk mencapai target-target tersebut. (Jalal, 2015, p. 1).

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa program-program SDG's sudah bagus dan memiliki korelasi dengan UMKM lokal. Namun, dari segi efisiensinya, penelitian ini menemukan bahwa terkait SDG's yang selama ini sudah dilakukan, masih belum optimal akibat belum tepat sasaran antara perencanaan dengan penggunaan anggaran. Dalam laporan *Global Sustainable Development Report 2019*, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyatakan perkembangan SDG's di seluruh dunia memang belum optimal. Implementasi SDG's masih belum sesuai dengan target awal. Target tersebut hanya bisa terpenuhi dengan kerja sama lintas instansi, pemerintah, dan lintas *stakeholder*.

Terdapat 5 program SDG's yang memiliki korelasi dengan UMKM, yakni SDG's ke-1, 8, 9, 10 dan 17. Dalam tujuan SDG's ke-1 untuk mencapai penuntasan tidak ada masyarakat dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan atau *no one left behind*, masih ada masalah di sektor pendidikan yang belum dituntaskan. Dalam indeks SDG's ke-8 di Indonesia, menunjukkan bahwa tantangan signifikan tetap ada. Dalam SDG's ke-9 terkait dengan industri, inovasi dan infrastruktur, meskipun infrastruktur di Indonesia meningkat, namun dari segi kualitas belum begitu baik. Tentu tujuan SDG's ke-10 belum tercapai. Mengingat, adanya kesenjangan ekonomi (PDRB per kapita) yang

cukup tinggi antarprovinsi di Indonesia. Terakhir, tujuan SGD's ke-17 sebetulnya memberikan kerangka kemitraan antar-sektor. Sayangnya tak cukup elaboratif dalam memandu bagaimana pemerintah-swasta-masyarakat sipil bisa melakukan kemitraan itu.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini memiliki keterbatasan, disebabkan metode penelitiannya adalah studi kepustakaan, oleh sebab itu kurangnya penelitian secara langsung lapangan, untuk mengimplementasikan ke 5 program yang ditarik dari tujuan SDG's untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM lokal. Diharapkan penelitian berikutnya dapat menganalisa secara realistis aplikasi dari program SDG's terhadap pertumbuhan UMKM lokal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A, R. A. (2014). *Sistem Pembelajaran Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Deepublish.
- Adrian, Wibowo, K., & Sarjana, S. H. (2022). POST-PANDEMI COVID-19 ECONOMIC RECOVERY. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 72–81.
- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 219.
- Analysis, A. (2019). *Sustainable Development Report 2019*. Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network.
- Ardista, R., Suryana, Y., Febrina, W., Turi, L. O., Sudiarti, S., Libriantono, B., & Perwitasari, E. P. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Eureka Media Aksara.
- Arianto, Z. (2018). *President Joko Widodo's Effort In Implementing Sustainable Development Goal In Indonesia* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18987/11.JURNAL.pdf?sequence=1>
- Asiati, D., & Nawawi. (2016). Partnersip in The Fishery Sector: Strategies For Business and Employment Sustainability. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(2), 103–118.
- Astuti, K. R. (2019). Infrastruktur dan Teknologi Dorong Kemajuan UMKM. *Forum Manajemen*, 17(2), 71–86.
- Atmaja, E., & Ratnawati, S. (2018). Pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Rekomen*, 14 Nomor 1, 21–35.

- Baeyens, A., & Goffin, T. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Sustainable Development. *European Journal of Health Law*, 22(5), 508-516. <https://doi.org/10.1163/15718093-12341375>
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka.
- Basuki, S. (2010). *Metode Penelitian*. Penaku.
- Caesario, E. B. (2022). Laju Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal. *Bisnis Indonesia*, 1. <https://bisnisindonesia.id/article/laju-pertumbuhan-ekonomi-belum-optimal>
- Fund, I. M. (2023). *Real GDP Growth Annual Percent Change*. World Economic Outlook (April 2023). [https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP\\_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD](https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD)
- Hakim, L., Mulyanto, Rutiana, Juwita, A. H., Pertiwi, A. B., Kusumastuti, Rahayu, M. J., Rivandi, P., Rini, E. F., Bintariningtyas, S., Guritno, D. C., & Mangkunegara, I. (2022). *Penerapan SDGs dalam Pembangunan Bangsa Prospek dan Kendala*. Penerbit Lakeisha.
- Harahap, F. L. (2021). *Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Sumatera Utara* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/38122/18313150.pdf?sequence=1>
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Jalal. (2015, November 12). Opini: Lingkungan dalam Logika Keberlanjutan SDGs. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2015/11/12/opini/>
- Kamil, I. (2022). KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi. *Kompas.Com*, 1. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/30/20093811/kpk-sebut-infrastruktur-indonesia-buruk-dampak-dari-korupsi>.
- Kemenkopukm. (2023). *Bantuan UMKM dari Pemerintah*. Smesta.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). *Dukungan Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM untuk Memperkuat Stabilitas Ekonomi Daerah*.
- Kementrian Penindustrian. (2015). *Cintai Produk Dalam Negeri Digalakkan Lagi*.

- Khairunnisa, A. (2018). *Revitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Provinsi Kalimantan Tengah*. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Kumolo, T. (2017). *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Lawi, G. F. K. (2019). SDGs Belum Optimal Akibat Perencanaan Belum Tepat Sasaran. *Bisnis.Com*, 1. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191119/9/1172072/sdgs-belum-optimal-akibat-perencanaan-belum-tepat-sasaran->
- Marlinah, L. (2020). *Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19 Oleh : Lili Marlinah Universitas Bina Sarana Informatika , Jakarta Email : lili.lrh@bsi.ac.id*. 22, 118–124.
- Martono, N. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Raya Grafindo Persada.
- Mathoulin, C., Messina, J. C., Muccioli, C., Nazerani, S., Ng, C. Y., Obdeijn, M. C., Overstraeten, L. Van, Prasetyono, T. O. H., Ross, M., Shih, J. T., Smith, N., Suarez, F. A. R., Chan, P., Tiemdjo, H., Wahegaonkar, A., Wells, M. C., Wong, W., Wu, F., Yang, X. F., ... Liverneaux, P. A. (2020). *COVID-19: Initial experience of an international group of hand surgeons*. January.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Natalia, M., & Mukti, M. (2014). *KAJIAN KEMISKINAN PESISIR DI KOTA SEMARANG ( Studi Kasus : Kampung Nelayan Tambak Lorok )*. 3(1), 50–59.
- Nayla, A. P. (2014). *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Laksana.
- Neneng, S., & Sui, J. M. (2022). *The Impact Covid-19 Outbreak , Green Finance , Creativity and Sustainable Economic Development on the Economic Recovery in G20 Countries*. 12(6), 432–440.
- Statistik, B. P. (2020). *Tingkat Pengangguran Terbuka*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html>
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115–129.

Sulaksono, H. (2018). ROADBLOCK IMPLEMENTASI PERAN QUADRUPLE HELIX. *Jurnal.Unej.Ac.Id*, 366-381.

Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. *Al-Intaj*, 6(2), 47-58. *Sustainable Development Goals Learn about immunisation's key role in achieving 14 of the 17 Sustainable Development Goa.* (2020). Gavi Vaccine Alliance.

Tambunan, T. T. H. (2009). *UMKM di Indonesia*. Ghalia Indonesia.

*The Goals SDG's.* (2023). Department of Economic and Social Affairs.

Tim. (2022). 3 Tantangan Ekonomi RI di 2023 Versi Sri Mulyani. *CNN Indonesia*. [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221202200328-532-882136/3-tantangan-ekonomi-ri-di-2023-versi-sri-mulyani#:~:text=Menkeu Sri Mulyani menyebut ada,CNN Indonesia%2F Bisma Septalisma\).&text=Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan,yang betul-betul harus dimitigasi](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221202200328-532-882136/3-tantangan-ekonomi-ri-di-2023-versi-sri-mulyani#:~:text=Menkeu Sri Mulyani menyebut ada,CNN Indonesia%2F Bisma Septalisma).&text=Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan,yang betul-betul harus dimitigasi).

WHO. (2020). *Coronavirus disease*. World Healty Organization.

Widjaja, & Yeremia. (2008). *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Forum Sahabat.